



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TONTRO PAHLAWANTO**
2. Jabatan : **PJ. BUPATI**
3. NHK : **477778**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/550 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 601.000.000

1. MOTOR, HONDA CB 150 R SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 250 SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MINI BUS Tahun 2016, LAINNYA Rp. 225.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HADIAH Rp. 4.000.000



7. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SL MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

8. MOBIL, HONDA BRIO RS CVT MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	543.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	51.964.028
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	665.441.628
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.011.955.656
III. HUTANG	Rp.	1.292.238.402
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.719.717.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.